



Implementasi Program Goes To School (GTS) Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Dinda Rahmawati Mujiarto Putri ¹, Isnaini Rodiyah ², ²¹

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.666 B Sidowayah Celep, Sidoarjo 61215, Indonesia

² Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.666 B Sidowayah Celep, Sidoarjo 61215, Indonesia

Abstract

This study aims to describe and illustrate the implementation of the Goes To School (GTS) Program in the E-KTP making service at the Sidoarjo Regency Population and Civil Registry Office by referring to the implementation theory put forward by George C. Edward III. The method used is a qualitative approach, namely data collection is carried out through direct observation and in-depth interviews with four informants involved. The research findings reveal that in the Communication indicator, clear communication and organized division of tasks already exist, but information updates need to be improved. In the Resource indicator, the resource budget is sufficient, but limited staff and facilities hamper the program, so it is necessary to increase staff and facilities and technical improvements. In the Disposition indicator, employees support the smooth running of the program with routine evaluations and incentives, but it needs to be improved. In the Bureaucratic Structure indicator, the service uses global SOPs and coordination between the Population and Civil Registry Office, schools, and the DPR is running well, but special SOPs so that the GTS program is achieved to be more efficient. Based on these findings, it is recommended that the Sidoarjo Regency Population and Civil Registry Office add staff and facilities and prepare special SOPs for the GTS program.

Keywords: Implementation; Services; E-KTP; Goes To School Program

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan implementasi Program Goes To School (GTS) dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan mengacu pada teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Metode yang digunakan yakni dengan pendekatan kualitatif yakni pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan empat informan yang terlibat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pada indikator Komunikasi, komunikasi jelas dan pembagian tugas yang terorganisir sudah ada, namun pembaruan informasi perlu diperbaiki. Pada indikator Sumber Daya, sumber daya anggaran mencukupi, tetapi keterbatasan staf dan fasilitas menghambat program, sehingga perlu peningkatan staf dan fasilitas serta perbaikan teknis. Pada indikator Disposisi, pegawai mendukung kelancaran program dengan evaluasi rutin dan insentif, namun perlu ditingkatkan. Pada indikator Struktur Birokrasi, pelayanan menggunakan SOP global serta koordinasi antar Disdukcapil, sekolah, dan DPR berjalan baik, namun SOP khusus untuk program GTS diperlukan agar lebih efisien. Berdasarkan temuan ini, disarankan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menambah staf dan fasilitas serta menyusun SOP khusus untuk program GTS.

Kata Kunci: Implementasi; Pelayanan; E-KTP; Program Goes To School

Dikirim:

Diperbaiki:

Diterima:

Dipublikasi:

¹ **CONTACT:** isnainirodiyah@umsida.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.28991/esj-20XX-XXXXX>

© 2025 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Pendahuluan

Pada era Society 5.0 yang sedang meningkat dengan pesat, kemajuan teknologi memberikan dampak besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah semakin memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) demi menerapkan E-Government. E-Government adalah strategi yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pelayanan publik dan memperbaiki aliran informasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan pihak terkait lainnya (Kasari et al., 2024). Peran penting E-Government dalam rangkaian penyelenggaraan pelayanan publik yakni mampu mengatasi kegagalan-kegagalan yang berlangsung dalam bidang pemerintahan karena E-Government ini hadir demi menciptakan jaringan informasi dan transaksi pada penyediaan pelayanan publik, agar pelayanan yang diberikan pemerintah dapat memperbaiki tingkat kepuasan masyarakat dan tidak terhambat oleh biaya dan waktu.

Beberapa jenis pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang termasuk di dalamnya ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah kebutuhan penting bagi setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap, yang mana berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah secara sah. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilengkapi dengan tingkat perlindungan data yang tinggi, karena menggunakan sistem komputer yang terhubung dengan database kependudukan nasional. KTP ini juga dilengkapi dengan chip yang memiliki kemampuan autentikasi dan tanda tangan digital, yang berfungsi untuk menghindari terjadinya KTP ganda dan pemalsuan data, serta memastikan keakuratan data penduduk. KTP juga berfungsi sebagai salah satu pencatatan alat kependudukan. Manfaat KTP meliputi dasar perencanaan pembangunan, akses terhadap pelayanan publik, penyediaan data dan statistik kependudukan, jaminan keamanan negara, pelaksanaan demokrasi (pemilu dan pilkada), serta pencegahan penyalahgunaan dokumen kependudukan, tindakan terorisme, pekerja ilegal, dan sebagai acuan untuk penerbitan dokumen lainnya seperti Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan dokumen identitas lainnya. (Syamuni et al., 2024). Sistem dan jenis pelayanan KTP yang diterapkan di Indonesia, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, sudah melalui beragam perkembangan. Pada mulanya layanan pembuatan KTP dibuat dengan cara konvensional yakni hanya berupa kartu identitas biasa, kemudian berganti dengan sistem Elektronik dengan menambah chip didalam kartu identitas kependudukan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia turut mengaplikasikan teknologi dalam sistem pemerintahannya, salah satunya pada pemberian layanan. Pelayanan publik dengan penggunaan teknologi digital tercermin pada pelayanan kependudukan, hal tersebut tentunya sejalan berdasarkan Peraturan Presiden RI yang tercantum dalam No. 95 tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu transformasi dari era e-government mengarah ke sistem i-government (pemerintahan terintegrasi). Integrasi pemerintah bertujuan guna menciptakan pemerintahan yang holistik dan berlanjut, serta menciptakan sistem birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien (Adinata et al., 2024). Sasaran dari SPBE sendiri adalah guna mencapai pengelolaan pemerintahan yang memiliki citra transparan, bersih, akuntabel, efektif, dapat dipercaya, dan tentunya berkualitas. Salah satu perwujudan pelayanan administrasi kependudukan yaitu pelayanan perekaman E-KTP pada warga negara. Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) diperlukan mendapat perhatian guna lebih ditingkatkan kualitasnya, karena administrasi kependudukan ialah hal yang mana amat krusial dan hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kelangsungan aktivitas setiap individu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan ialah proses pengorganisasian dan pengaturan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya bagi pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Kabupaten Sidoarjo mempunyai jumlah penduduk 2 juta jiwa berdasarkan data per 2024, dengan usia 15-19 tahun sejumlah 139,26 ribu jiwa, dimana jumlah tersebut memenuhi 6,95% dari jumlah

penduduk di Sidoarjo. Berdasarkan tingginya presentase tersebut, diantara upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo demi terus mempertinggi kesadaran remaja di Sidoarjo terhadap kepemilikan identitas kependudukan atau E-KTP yaitu melalui program Goes To School (GTS). Program Goes To School ialah suatu inovasi baru yang mana diluncurkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sidoarjo. Program Goes To School ini sudah berjalan sejak tahun 2022. Program Goes To School ini mengacu pada Perbup No. 78 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang dilakukan pada program ini yaitu melakukan Perekaman dan percetakan KTP bagi pemula. Dalam penerapan program tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Secara langsung mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan lembaga pendidikan setingkat lainnya dengan menggunakan sistem jemput bola. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo akan memberikan pelayanan pembuatan KTP Elektronik langsung di sekolah kepada siswa dan siswi SMA sederajat yang telah berusia 17 tahun. Program ini rutin dilakukan setiap seminggu satu kali yakni di hari Selasa atau Kamis. Sistem dari perekaman KTP tersebut sama dengan sistem perekaman pada umumnya yang biasa dilakukan di MPP maupun di Kecamatan yang melalui beberapa tahap dengan dilakukan secara langsung ditempat yaitu pembacaan biodata, foto, perekaman tanda tangan, scan sidik jari, dan scan retina mata. Kemudian setelah perekaman selesai menunggu kurang lebih satu jam untuk hasil cetaknya karena dicetak langsung ditempat menggunakan alat cetak yang sudah tersedia. Sasaran program Goes To School untuk siswa siswi yang berumur 16 dan 17 tahun. Untuk yang berumur 16 tahun sudah bisa mengikuti program tersebut tetapi hanya bisa melakukan perekamannya saja, untuk pengambilan bisa diambil saat sudah berumur 17 tahun di Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkaran Timur dengan membawa kwitansi tanda terima dan tanda bukti pengambilan yang dikasih saat proses perekaman di sekolah. Untuk yang sudah berumur 17 tahun bisa melakukan perekaman sekaligus cetak langsung ditempat.

Inovasi program ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan pemerataan kepemilikan dokumen kependudukan E-KTP di seluruh kalangan masyarakat, termasuk di antaranya para pelajar yang sudah berusia 17 tahun. Diharapkan, manfaat adanya program ini bisa memudahkan para pelajar SMA dapat menerima layanan pembuatan E-KTP tanpa perlu mengorbankan waktu belajar mereka atau izin untuk tidak mengikuti pelajaran di sekolah (Putra & Pertiwi, 2023). Manfaat lain untuk pemerintah terhadap adanya program Goes To School ini sebagai upaya peningkatan akurasi data kependudukan, artinya dengan mencatat data identitas para siswa yang baru berusia 17 tahun pemerintah dapat memperbarui dan menjaga akurasi database kependudukan nasional dan pemerintah melakukan program Goes To School juga untuk memenuhi target KTP Pemula. Setiap tahunnya di Kabupaten Sidoarjo jumlah penduduk terus bertambah yang menyebabkan wajib KTP setiap tahunnya juga bertambah. Berikut adalah tabel data perbandingan banyaknya siswa siswi SMA/SMK yang sudah rekam sekaligus cetak E-KTP pada Program Goes To School (GTS) tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo:

Table 1. Data Perbandingan yang Sudah Rekam dan Cetak E-KTP pada Program Goes To School Tahun 2024

No	Daftar Sekolah SMA	Yang Sudah Rekam E-KTP	Yang Bisa Cetak E-KTP	Yang Tidak Bisa Cetak E-KTP
1	MA Islamiyah Candi	74	-	74
2	MAN Sidoarjo	62	10	52
3	SMK Mawa Waru	102	6	96
4	SMA 2 Hangtuh Gedangan	112	69	43

5	SMA Antartika Sidoarjo	56	15	41
7	SMA Avisena Jabon	69	37	32
8	SMA Senopati Sedati	73	41	32
9	SMA Wahid Hasyim 2 Taman	41	23	18
10	SMAN 1 Gedangan	72	29	43
11	SMAN 1 Krembung	55	-	55
12	SMAN 1 Porong	64	32	32
13	SMAN 1 Sidoarjo	76	22	54
14	SMAN 1 Waru	114	72	42
15	SMAN 4 Sidoarjo	136	83	53
16	SMAN 1 Sidoarjo	155	-	155
17	SMAS AL Islam Krian	83	15	68
18	SMK Antartika 2 Sidoarjo	170	61	109
19	SMK Antartika 1 Sidoarjo	152	70	82
20	SMK Darul Ulum Waru	59	-	59
21	SMK Islam Krembung	151	71	80
22	SMK Krian 2	150	73	77
23	SMK Ma'arif NU Prambon	54	21	33
24	SMK Penerbangan Sedati	42	-	42
25	SMK Trisakti Tulangan	114	44	70
26	SMK Yapalis Krian	50	-	50
27	SMK YPM 3 Taman	81	39	42
28	SMK YPM 8 Sidoarjo	105	23	82
29	SMK YPM 11 Wonoayu	75	37	38
30	SMKN 1 Sidoarjo	101	18	83
31	SMKN 3 Buduran	65	12	53

Sumber : Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1. dari data yang mengikuti perekaman KTP bahwa banyak siswa yang antusias untuk mengikuti program Goes To School di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut menyebabkan instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo kewalahan dalam kegiatan tersebut. Dari data yang telah menjalani perekaman menyebabkan E-KTP hanya tercetak sekitar 30% hingga 50% siswa. Untuk jumlah yang belum bisa tercetak 30% nya ada siswa yang memang masih berumur 16 tahun tetapi jumlah yang paling banyak sekitar 70% adalah siswa yang sudah berumur 17 tahun. Pada Program Goes To School untuk pelajar yang sudah berumur 17 tahun namun KTP nya belum dapat dicetak langsung ditempat, pihak sekolah dapat mengambil di Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur dengan batas waktu pengerjaan satu sampai dua hari jadi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seharusnya pada program tersebut, siswa yang sudah berumur 17 tahun bisa melakukan proses rekam dan cetak KTP secara langsung di tempat. Karena pertama, jumlah sumber daya manusia belum mencukupi dibanding dengan jumlah siswa. Untuk ideal nya di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berdasarkan analisis jabatan dan pemetaan jabatan jumlah pegawai minimal 120 orang. Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini hanya 90 orang. Pada jumlah yang mana dipunyai saat ini beberapa ada yang sudah pensiun, dan pegawai yang ditugaskan pada program tersebut sekitar 10 pegawai saja. Jadi kuantitas sumber daya manusia Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah siswa

yang mengikuti program tidakimbang. Kedua, permasalahan yang lain juga terdapat pada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ketiga, keterbatasan waktu antara kegiatan sekolah dan jam kerja Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo juga menjadi faktor penghambat keberhasilan program karena jika yang mengikuti program tersebut banyak maka lebih banyak memakan waktu dalam pelaksanaannya. Keempat, pada data pusat, jika ada yang sudah berumur 17 tahun tetapi tidak bisa langsung cetak karena ada beberapa dari pusat belum terkonfirmasi karena ada data yang tidak sesuai. Kelima, masalah SOP dari program tersebut juga belum jelas dan program tersebut juga kurang sistematis. Maka dari itu program Goes To School ini pengimplementasian programnya belum berjalan dengan optimal karena pada proses pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal dan sistematis. Pada beberapa permasalahan yang terjadi mengakibatkan juga terjadinya antrian panjang.

Menurut George C. Edward III (1980: 10), Implementasi Kebijakan ialah suatu tahapan kebijakan publik yang dimana antara pembuatan kebijakan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang terpengaruh. Model implementasi Edward III menekankan pentingnya struktur pemerintah dalam menjelaskan proses implementasi kebijakan. Proses ini berasumsi bahwa jika pelaksana mengikuti prosedur yang ditetapkan, hasil yang diinginkan akan tercapai. Namun, kenyataannya kebijakan pemerintah seringkali tidak sempurna dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik (Patu et al., 2023). George C. Edward III (1980: 10) mengemukakan bahwa ada empat faktor penting untuk mengukur implementasi yaitu, Pertama komunikasi, dimana komunikasi berperan dalam membentuk pemahaman yang seragam yakni yang berada di kalangan pelaku kebijakan. Kedua sumber daya, faktor sumber daya yang bermakna bahwa kebijakan hanya dapat berhasil jika didukung sumber daya yang cukup, baik itu tenaga, dana, maupun materi. Ketiga disposisi, yang dimana disposisi juga memiliki peran penting dalam tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Keempat struktur birokrasi, dalam struktur birokrasi ini termasuk pembagian kerja dan tanggung jawab, juga berperan penting dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan tertentu (Tukan & Rahmadanita, 2023).

Permasalahan implementasi program pada pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Sidoarjo juga ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Bunga Kasih dan Hagia Harsanti, 2022 berjudul “Implementasi Program Jemput Bola Layanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara” menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi yaitu informasi yang belum menyebar ke masyarakat terpencil dan kurangnya kejelasan tugas pegawai hal tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat. Kemudian permasalahan lain terdapat pada indikator sumber daya manusia, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, serta kualitas internet yang buruk (Kasih & Harsanti, 2022).

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Hery Herawan, Candradewini, Ratna Meisa Dai, 2021 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Ktp El Di Kabupaten Bandung” menunjukkan pada indikator sumber daya, pada sumber daya manusia untuk tenaga teknis pelayanan adminduk di kewilayahan dirasakan masih kurang. Lalu pada sumber daya fasilitas, yang disediakan oleh internal Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Bandung sudah memadai sesuai dengan kebutuhan. Namun, sumber daya fasilitas yang berasal dari Dirjen Dukcapil Kemendagri sering mengalami gangguan, hal ini yang menyebabkan lonjakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pencetakan KTP-el. Selain itu, pada indikator struktur organisasi di Pelaksanaan fragmentasi dan distribusi tanggung jawab dalam satu lingkup kebijakan belum berjalan sesuai harapan, karena petugas administrasi kependudukan memiliki peran ganda, yaitu sebagai petugas teknis layanan administrasi kependudukan sekaligus sebagai pegawai yang menghadiri rapat koordinasi administrasi kependudukan dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung (Herawan & Dai, 2021).

Adapun penelitian serupa oleh Maria Anis Suhartatik, Isnaini Rodiyah, 2024 berjudul “Implementasi Program Sipraja dalam Pelayanan Administrasi Publik” menunjukkan bahwa pada indikator disposisi atau sikap pelaksana, yang mencakup komitmen dan kedisiplinan dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berusaha mempersiapkan

sumber daya manusia dan kelembagaan melalui program sosialisasi, tetapi jumlah pertemuan sosialisasi yang terbatas hanya dua kali yaitu dimana dapat mempengaruhi kemampuan pelaksana dalam menguasai teknologi dan mengelola sistem informasi desa, termasuk Aplikasi Sipraja (Suhartatik & Rodiyah, 2024).

Berdasarkan permasalahan yang masih banyak terjadi pada program tersebut yakni membuat peneliti tertarik untuk mendeskripsikan Implementasi Program Goes To School dengan tujuan agar mengetahui terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian program pelayanan E-KTP kepada masyarakat terutama siswa siswi SMA/SMK yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

2. Metode

Pada metode penelitian yang mana diterapkan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2010), metode kualitatif dikenal sebagai metode penelitian yang naturalistik karena penelitian tersebut dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono., 2010). Pada penggunaan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif tersebut adalah demi mewujudkan harapan peneliti dalam memperoleh gambaran dan penjelasan yang jelas serta akurat mengenai fenomena yang diteliti, baik secara deskriptif maupun naratif Lokasi penelitian yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan sebab mengamati adanya indikasi permasalahan yakni terkait dengan topik. Fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Implementasi program Goes To School (GTS) dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan teori menurut George C. Edward III (1980: 10) ialah terdiri atas empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, dsiposisi, struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel *non-random* dengan menentukan individu mengacu pada kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Lenaini, 2021). Informan yang memberikan data terkait keadaan dan kondisi di lapangan antara lain kepala bidang pendaftaran penduduk (dafduk), perangkat disdukcapil sidoarjo dan masyarakat penerima program. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data, pada data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman (1994) ada 4 untuk menganalisis penelitian kualitatif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles et al., 1994). 1). Pengumpulan data, yakni merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi atau data dari lapangan yang nantinya akan digunakan untuk menyusun gambaran guna memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai fenomena yang tengah diteliti. Untuk proses selanjutnya yaitu dilakukan dengan, 2). Reduksi data, ialah proses seleksi, penekanan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dimana diperoleh berdasarkan catatan lapangan. Prosedur tersebut membantu memusatkan perhatian pada informasi yang esensial dan menghilangkan informasi yang kurang penting atau tidak relevan. Setelah di reduksi dilanjutkan dengan, 3). Penyajian data ialah proses di mana beberapa informasi disusun membuatnya dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Kemudian setelah penyajian data dilanjutkan dengan, 4). Penarikan kesimpulan, yaitu penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mengidentifikasi arti dari objek yang ditemukan, mencatat ciri-ciri yang terlihat, memberikan penjelasan, mengamati kemungkinan hubungan antara elemen-elemen yang ada, serta menyusun hubungan sebab-akibat dan proposisi yang relevan (Rijali, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sejumlah sumber yang relevan, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul Program Goes To School (GTS) dalam layanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian saat ini, peneliti merujuk pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang mengemukakan bahwa implementasi suatu program dapat dianalisis melalui 4 aspek utama. Keempat aspek tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel utama yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan (Prasetijowati et al., 2023). Pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dengan baik melalui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mencapainya. Penyampaian dengan jelas ukuran dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Konsistensi dan keselarasan dalam ukuran serta tujuan kebijakan harus dikomunikasikan agar para pelaksana dapat memahami dengan tepat apa yang menjadi ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut. Idealnya komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang juga baik. Proses penyampaian komunikasi yang disebut transmisi dalam hal ini dilakukan oleh pihak Dukcapil ke sekolah yang dituju dalam program Goes To School melalui surat. Surat yang ditujukan oleh pihak Dukcapil ke sekolah bertujuan untuk menyampaikan pelaksanaan program Goes To School yang akan dilaksanakan mendatang. Situasi ini diperkuat menggunakan hasil wawancara oleh Bapak Arief Sumeru sebagai Plt. Kabid Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa sekolah yang bersurat, ada data sekolah SMA dan kita juga menyisir sekolah-sekolah yang ada di Sidoarjo, baik itu ada yang mengajukan tertulis surat ataupun dilakukan secara acak belum bersurat ya kita tetap jalani”

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama Bapak Affan selaku Staff Bidang Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Jadi kita itu bersurat, setelah bersurat dari tim kita itu akan melakukan survey, jadi tim kita survey sekolah yang akan dituju melihat terkait jaringan, fasilitas, dan lainnya”

Sistemnya untuk menyampaikan informasi terkait Program Goes To School kepada sekolah yaitu dengan pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bersurat kepada pihak sekolah dan dilanjutkan dengan survey langsung ke sekolah yang dituju untuk memastikan kesiapan sekolah dari segi fasilitas dan infrastruktur. Kemudian agar komunikasi antara pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik saat melakukan survey juga diadakan sosialisasi kepada para guru terkait Program Goes To School yang akan diadakan di sekolah tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Yanuar selaku staff Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“kita sosialisasi sebelum acara mulai, mungkin ke internal gurunya ya, misal nantik kita kita datang di tanggal sekian, persyaratannya apa aja, lalu gurunya yang mengumumkan ke siswanya”

Komunikasi ke siswa yaitu melalui pihak sekolah yang menyampaikan seputar persyaratan untuk berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan sistem komunikasi demikian menyebabkan pelaksanaan program Goes To School dapat berjalan dengan lancar. Adanya persiapan yang matang dan informasi yang jelas juga terjadi karena adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo kepada para guru ke sekolah yang dituju tersebut. Proses komunikasi yang baik juga harus sejalan dengan adanya kejelasan. Kejelasan tentang persyaratan dan tata cara pembuatan E-KTP dalam program Goes To School juga disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa SMA. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara Bapak affan selaku Staff Bidang Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Iya sudah jelas, kita kan ada proposal pas pengajuan dan itu diserahkan ke sekolah nantik sekolah mempelajari kalau sekolah sudah acc ya kita tinggal pelaksanaan aja”

Seluruh informasi terkait program Goes To School disampaikan dengan jelas kepada sekolah melalui proposal yang mudah dipahami. Proses ini memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa sekolah-sekolah yang terlibat sudah siap dan menyetujui program sebelum dilaksanakan.

Disisi lain, program Goes To School juga dapat berjalan dengan baik karena tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai dalam pelaksanaan program tersebut sudah jelas. Dalam pelaksanaan Program Goes To School tentunya didukung oleh petugas sesuai tupoksi yang ada pada surat tugas yang diberikan. Situasi ini seiring dengan temuan dari wawancara yang dilakukan bersama Bapak Arief Sumeru sebagai Plt. Kabid Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dari dinas pun nantinya semuanya sudah siap, kita bawa tim yang sesuai dengan kegiatan kita, yaitu tim rekam, tim IKD, dan tim sosialisasi gabung jadi kesatuan pada kegiatan tersebut. Jadi semua tugas nya masing-masing sudah jelas dan saling membantu”

Adanya kejelasan mengenai pembagian tugas membuktikan bahwa komunikasi antara Kepala Bidang dengan staff di lapangan sudah sangat baik. Program Goes To School berjalan lancar karena pembagian tugas yang jelas dan adanya kerjasama yang baik antar tim yang terlibat. Setiap tim memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung dalam mencapai tujuan program, yang menjadikan prosesnya lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik. Komunikasi yang baik juga selalu seiringan dengan adanya konsistensi. Pada program Goes To School telah konsisten dilaksanakan setiap seminggu satu kali, tetapi pada tahun 2024 program Goes To School lebih sering dilaksanakan seminggu dua kali dalam rangka meningkatkan daftar pemilih tetap usia 17 tahun dalam mendukung kontestasi pemilu tahun 2024. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan dari wawancara dengan bapak Yanuar sebagai staff sekretariat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Program Goes To School normal pelaksanaannya yaitu seminggu hanya sekali. Tahun 2024 ini sering seminggu 2 kali karena akan adanya pelaksanaan pemilu, Yang dimana pihak dukcapil mengejar agar ada pihak suara karena yang berumur 17 tahun banyak yang belum rekam dan memiliki KTP”

Berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program yang terjadi secara konsisten. Meskipun pada tahun 2024 program ini dilaksanakan lebih sering (dua kali seminggu) hal tersebut bertujuan untuk mempercepat perekaman KTP bagi pemilih usia 17 tahun, dan sebagai upaya untuk mendukung persiapan pemilu serta memastikan pemilih yang sah terdaftar dengan lengkap. Dalam menjalankan komunikasi, penting untuk tetap konsisten dan jelas agar dapat diterapkan dengan baik. Perubahan-perubahan yang sering terjadi pada pemerintah dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dari konsistensi yang sudah dijalankan pada Program Goes To School membuat banyak sekolah yang sudah bekerjasama dengan pihak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Berikut data rekapitulasi banyaknya sekolah SMA atau SMK se Kabupaten Sidoarjo yang sudah bekerjasama dengan pihak Disdukcapil Kabupaten dari tahun 2023-2024 :



Sumber: Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dari diagram 1. menunjukkan hasil rekapitulasi dari banyaknya sekolah se Kabupaten Sidoarjo yang sudah bekerja sama dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Pada jumlah tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah sekolah yang bekerja sama dengan Disdukcapil dalam program Goes To School menunjukkan bahwa program ini semakin efektif dan mendapat respons positif dari sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Konsistensi dalam pelaksanaan program dan peningkatan

frekuensi pelaksanaannya pada tahun 2024 berperan penting dalam meningkatkan angka kepemilikan E-KTP bagi siswa usia 17 tahun. Maka dari itu adanya konsistensi yang baik juga terjadi karena komunikasi yang baik antar Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan sekolahan SMA/SMK se Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan beberapa temuan dari wawancara dan data, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwasanya komunikasi yang jelas, konsisten, terorganisir, dan adanya pembagian tugas yang jelas menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Program Goes To School, yang mendukung pencapaian tujuan program dengan lancar. Hal ini sejajar dengan hasil penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Program “Paling Jempol” Ktp Untuk Pemula” (2024). Dikemukakan bahwa komunikasi yang efektif, meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi, memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi Program Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jempol) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Melalui sosialisasi yang jelas, informasi yang mudah diakses, dan pelaksanaan yang konsisten, program ini berhasil diimplementasikan dengan baik (Berlianto & Muljanto, 2024).

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menyoroti bahwa pelaksanaan Program Goes To School memberikan dampak positif yang signifikan berkat penerapan komunikasi yang efektif, yaitu melalui transmisi yang terorganisir, kejelasan informasi, dan konsistensi program. Hal ini memastikan informasi sampai dengan jelas kepada pihak terkait, memudahkan pemahaman prosedur, dan mempercepat perekaman KTP tanpa kebingungan, sehingga program berjalan lancar dan mencapai tujuan kebijakan untuk memenuhi perekaman KTP bagi pemilih usia 17 tahun. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Habermas (1984) tersebut menguatkan bahwa komunikasi yang mana ideal di ruang publik harus bersifat rasional, transparan, dan saling memahami. Dalam komunikasi kebijakan publik, rasionalitas diperlukan agar kebijakan didasarkan pada data dan analisis yang objektif. Transparansi memastikan pemerintah terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, pemahaman bersama mendorong partisipasi masyarakat, mengurangi resistensi, dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Habermas, 1984). Lebih lanjut Mazmanian & Sabatier (1983) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan, komunikasi yang jelas dan terorganisir penting untuk menjamin kebijakan dapat diterapkan dengan efisien di lapangan. Kejelasan informasi membantu pelaksana memahami tujuan kebijakan, sementara transmisi komunikasi yang baik memastikan pesan tersampaikan dengan tepat kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, interaksi dua arah antara pembuat kebijakan dan penyelenggara memungkinkan adanya umpan balik yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan (Mazmanian & Sabatier, 1983). Dengan demikian, komunikasi yang efektif melalui transmisi yang terorganisir, kejelasan informasi, dan konsistensi program, memberikan dampak positif pada pelaksanaan Program Goes To School. Komunikasi yang baik memastikan informasi disampaikan dengan jelas, memudahkan pemahaman prosedur, dan mempercepat pelaksanaan perekaman KTP tanpa kebingungan.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya ialah unsur utama dalam menganalisis kebijakan yang sedang dijalankan, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau anggaran, dan sumber daya fasilitas atau sarana prasarana (Indarwati & Mirani, 2021). Meskipun implementasi program jelas, konsisten, dan komunikasi yang dikirim akurat, hal tersebut tidak akan efektif apabila pegawai yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program dengan keterbatasan sumber daya untuk menjalankan perannya. Sumber daya yang memadai akan membuat pengimplementasian program berjalan dengan lancar dan efektif. Sumber daya yang harus memadai yaitu terkait sumber daya manusia. Pada Program Goes To School sumber daya manusia pada jumlah staff yang tergabung juga terbatas. Hal tersebut juga dapat menjadi penghambat dalam pengimplementasian Program Goes To School. Berikut diungkapkan oleh Bapak Yanuar selaku staff sekretariat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Sumber daya manusia ini juga sangat berpengaruh, karena kita sendiri juga sangat kurang, Karena saat yang mengikuti perekaman banyak kita masih kewalahan dan itu yang membuat kita tidak memungkinkan untuk bisa cetak ditempat karena ada keterbatasan waktu juga. Karena jumlah pegawai yang bertugas biasanya max 10 orang saja”

Keberadaan sumber daya manusia yang terbatas mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan program perekaman. Ketika jumlah peserta yang mengikuti perekaman banyak, kekurangan tenaga kerja menyebabkan petugas kewalahan dalam menangani proses tersebut. Akibatnya, hal ini membuat pelaksanaan program belum berjalan secara optimal, seperti ketidakmampuan untuk langsung mencetak KTP di tempat untuk siswa berumur 17 tahun, karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang tersedia. Adapun hal lain yang membuat KTP tidak bisa tercetak langsung di tempat pada hari tersebut untuk siswa yang sudah berumur 17 tahun yaitu karena dari data pusatnya langsung. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak affan selaku Staff Bidang Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa :

“kalau sudah perekaman itu kan ada status status nya untuk menjadikan NIK itu bisa cetak KTP, kita nunggu penunggulan data dari pusat dulu dan penunggulan dari pusat juga tidak bisa ditunggu satu menit atau dua menit karena dari pusat yang dikelola datanya juga jutaan, jadi kita juga nunggu proses penggantian status perekaman itu dari pusat. Kalau sudah PRR (Print Ready Record) itu baru bisa di cetak”

Proses cetak KTP tidak dapat langsung dilakukan setelah perekaman karena harus menunggu proses administratif yang dikelola pusat. Jadi KTP dapat dicetak hanya setelah status tersebut berubah menjadi PRR. Hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk beberapa siswa yang sudah berumur 17 tahun KTP tidak bisa langsung cetak ditempat saat program sedang berlangsung dikarenakan masih menunggu status PRR dan tidak semua siswa datanya bisa langsung berstatus PRR (Print Ready Record). Maka adanya hal tersebut membuat beberapa yang melakukan perekaman tidak dapat mencetak KTP secara langsung di tempat. Sehubungan dengan sumber daya manusia yang harus memadai saat Program Goes To School berlangsung, para staff juga perlu memiliki keterampilan serta keahlian yang cukup guna mengoperasikan sistem dan memberikan pelayanan pembuatan E-KTP di sekolah-sekolah. Karena Keberhasilan selama pelaksanaan program ini bergantung pada keahlian sumber daya manusia yang terlibat agar program dapat terimplementasikan dengan baik. Di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo meskipun sumber daya manusia nya terbatas tetapi masing-masing staff sudah memiliki kualifikasi dan keterampilan yang memadai. Menurut temuan dari wawancara dengan Bapak Yanuar sebagai staff sekretariat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo :

“Kalau operator itu all user, jadi bisa mengoperasikan semuanya. Misal jabatan di bidang dafduk tapi dia juga bisa memproses di bidang capil bisa memproses IKD nya piak. Jadi memang kualifikasinya harus semua bisa, tapi dia punya jabatan sendiri-sendiri. Karena jabatan adalah tanggung jawab masing masing tapi kalau tugas memang bisa semua”

Hal ini selaras dengan wawancara bersama Bapak Arief Sumeru selaku Plt. Kabid Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo terkait kualifikasi dan keterampilan masing-masing pegawai yaitu:

“Iya, karena semua sama basicnya, teman teman operator yang mempunyai baik perekaman, IKD, dan support dalam kegiatan sosialisasi”

Semua pihak yang terlibat dalam program, seperti operator yang mengurus perekaman data, Pengaktifasian IKD (Indeks Kependudukan Digital), dan dukungan dalam kegiatan sosialisasi, memiliki peran yang saling terkait dan berkesinambungan. Meskipun bidang dan tugas mereka berbeda, mereka semua memiliki dasar atau tujuan yang sama, yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan program secara keseluruhan.

Adapun Sumber daya yang harus memadai bukan hanya sumber daya manusia saja, sumber daya yang harus memadai lainnya yaitu sumber daya anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk pengimplementasian program mencakup semua kebutuhan operasional, termasuk transportasi, pengadaan materi sosialisasi, dan fasilitas lainnya juga harus memadai. Pada Program Goes To School sumber daya anggaran juga sudah memadai mencakup keseluruhan kebutuhan pada program tersebut. Adapun terkait dengan sumber daya anggaran pada Program Goes To School menurut

Bapak Yanuar selaku staff sekretariat dan yang memegang anggaran di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo :

“Iya mencukupi, kalau untuk kegiatan gts itu kan kegiatan milik bidang dafduk, jadi tiap bidang itu ada kegiatan masing masing dan perbidang itu sudah ada anggarannya masing-masing yang sudah diperhitungkan dari tahun sebelumnya yang dimana kita melihat dari tahun sebelumnya apakah anggaran itu di tahun tersebut kurang atau tidak jika kurang maka ditahun selanjutnya kita menambah jumlah anggaran yang diajukan. Jadi kita tidak pernah kekurangan anggaran di tahun berikutnya”

Hal ini selaras dengan wawancara bersama Bapak Arief Sumeru selaku Plt. Kabid Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo terkait kualifikasi dan keterampilan masing-masing pegawai yaitu:

“Sampai dengan saat ini sudah sesuai sampai bisa terlaksananya kegiatan GTS, Saya pikir untuk anggaran pasti sudah mencukupi baik itu BBM, makan, banner, dan sebagainya”

Dalam mekanisme pengelolaan anggaran Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo selalu memastikan alokasi anggaran untuk kegiatan berjalan dengan baik dan selalu mencukupi sejalan dengan kebutuhan yang berkembang. Karena anggaran juga dibutuhkan agar pelaksanaan Program Goes To School berjalan dengan baik. Maka dalam pengimplementasian suatu program dapat berjalan dengan baik jika sumber daya anggaran juga memenuhi. Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sumber daya lainnya yang berpengaruh pada pengimplementasian sebuah program merupakan sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas yang digunakan dalam pengimplementasian sebuah program juga harus memadai agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo beberapa sarpras yang ada saat program juga terbatas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yanuar selaku staff sekretariat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bahwa:

“Kalau sarpras memang kita mengalami keterbatasan, seperti mesin cetak hanya membawa 1 saja untuk yang lain seperti alat alat perekaman dan mobil dinas juga sudah mencukupi, kalau jaringan sudah diluar kendali kita, karena sekarang satu jaringan, seluruh dinas sekarang ikut kominfo semua jaringannya”

Dari beberapa fasilitas dan peralatan ada keterbatasan salah satunya mesin cetak dan pengaruh dari pengelolaan jaringan yang berada di luar kendali mereka. Keterbatasan dalam sarpras ini membuat pengimplementasian Program Goes To School belum berjalan dengan optimal. Dari permasalahan siswa yang tidak bisa tercetak keseluruhan untuk yang sudah berumur 17 tahun saat program berlangsung, keterbatasan sarpras pada alat cetak merupakan salah satu alasan nya. Disaat siswa yang mengikuti Program Goes To School ada lebih dari 100 siswa maka tidak memungkinkan untuk bisa cetak keseluruhan pada saat itu juga dengan hanya menggunakan satu alat cetak saja. Disisi lain, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo beberapa sarpras yang ada sudah memadai tapi juga banyak mengalami kendala terkait sarpras yang ada tersebut. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak affan selaku Staff Bidang Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Kalau kendala sendiri mungkin di konsep penataan kita ya, kan kalau nyetting alat-alat itu membutuhkan meja dan sebagainya kan harus sesuai dengan yang kita harapkan dan kemungkinan ada kayak meja yang gabisa kita geser terus terlalu jauh dengan koneksi internet nya, nah itu membuat jadwal program kita jadi molor sih”

Hal ini selaras dengan wawancara bersama Ibu Anggun selaku Staff Bidang Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo :

“Kendalanya mungkin di SLAK nya, dan di jaringan juga, kalau untuk laptopnya oke semua karena ada pemeliharannya, terus kadang di printernya kayak kemarin itu ada rekam dan cetak ktp nah itu printernya jelek kayak hasilnya ada garis-garis nya gitu tapi kita usahakan tetap ngasih yang hasil terbagus. Terus kendala lain mungkin saat perekaman ada siswa yang tangan nya halus terus pecah pecah itu yang agak susah karena butuh waktu yang agak lama”

Adanya berbagai kendala teknis dan operasional dalam menjalankan tugas, mulai dari penataan tempat, masalah peralatan, hingga kendala sistem dan kualitas perekaman juga mempengaruhi kelancaran pengimplementasi program Goes To School. Meskipun ada kesulitan-kesulitan tersebut,

Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo mencoba sebaik mungkin untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Program Goes To School (GTS) di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan beberapa masalah teknis. Meskipun anggaran mencukupi, keterbatasan staf dan fasilitas, seperti mesin cetak dan jaringan, menghambat kelancaran program. Adapun kurangnya sumber daya yang dapat membuat pengimplementasian program berjalan tidak optimal dibuktikan dengan data jumlah pegawai Keseluruhan di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025:

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai Keseluruhan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	ASN	41 Orang
2.	PPPK	07 Orang
3.	Non ASN	34 Orang
4.	Outsourcing	15 Orang

Sumber: Hasil Olah Peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dari tabel 2. Menunjukkan hasil rekapitulasi total pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ada 90 orang, sedangkan idealnya berdasarkan analisis jabatan dan pemetaan jabatan jumlah pegawai minimal 120 orang. Pada Program Goes To School pegawai yang ditugaskan maksimal 10 orang. Maka dari itu Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo pada Sumber daya manusia ini masih sangat terbatas. Karena jika yang mengikuti perekaman banyak dengan sumber daya yang terbatas membuat program berjalan kurang maksimal. Oleh sebab itu, sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas sangat berperan penting agar pengimplementasian program tersebut bisa berjalan dengan optimal.

Dari beberapa hasil wawancara dan data adanya sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan fasilitas, dan masalah teknis menjadi faktor yang menghambat pengimplementasian Program Goes To School di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Jika ketiga sumber daya ini dapat dipenuhi dengan lebih baik, maka program tersebut dapat berfungsi lebih efektif dan menghasilkan *outcome* yang lebih maksimal bagi masyarakat. Hal ini sejajar dengan hasil penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan

Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan” (2020). Dikemukakan bahwa Pelaksanaan program KTP-el di Kota Padangsidimpuan pada sumber daya menghadapi tantangan seperti kekurangan SDM, fasilitas yang tidak memadai, kurangnya komunikasi yang efektif, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program ini. Faktor sosial seperti tanggung jawab keluarga dan pekerjaan juga menghambat partisipasi warga. Untuk perbaikan, perlu adanya peningkatan komunikasi, fasilitas, dan pelatihan bagi petugas (Hasibuan et al., 2020).

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menyoroti bahwa pentingnya sumber daya yaitu manusia, fasilitas, dan anggaran dalam keberhasilan implementasi program. Tantangan terkait keterbatasan staf dan fasilitas teknis ini yang menghambat kelancaran program, adapun anggaran yang mencukupi, tanpa sumber daya yang cukup, program tidak akan berjalan secara optimal. Situasi ini sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa kesuksesan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya administratif, seperti tenaga kerja terlatih dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan publik sering menghadapi kendala dalam penerapan, seperti kesulitan teknis dan kurangnya koordinasi. Sehingga, perencanaan matang dan dukungan administratif kuat sangat penting untuk mencapai efektivitas kebijakan (Grindle, 1980).

Lebih lanjut, Meter dan Horn (1975) mengatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun non-manusia. Tanpa tenaga kerja yang terampil, fasilitas, teknologi, dan anggaran yang cukup, kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Keterbatasan sumber daya akan menghalangi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuannya (Meter & Horn, 1975). Dengan demikian, keberhasilan implementasi program sangat terpaut pada ketersediaan sumber daya,

termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang cukup. Tantangan seperti keterbatasan staf dan fasilitas teknis dapat menghambat kelancaran pengimplementasian program, meskipun anggaran sudah mencukupi. Oleh karena itu, dukungan yang optimal dari sumber daya manusia yang terampil serta fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

3.3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memainkan peranan dimana sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan dapat terlaksana secara efektif, pelaksana kebijakan perlu memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan serta memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakannya dengan baik (Manshuri & Rahaju, 2023). Adapun variabel yang sangat penting dalam disposisi ini adalah pengangkatan birokrat. Dimana pemilihan dan pengangkatan birokrat yang tepat sangat penting, karena sikap atau disposisi penyelenggara dapat menjadi tantangan nyata dalam implementasi kebijakan jika staf yang tersedia tidak menjalankan kebijakan yang diharapkan oleh pejabat tinggi. Dengan demikian, staf atau personel yang dipilih untuk menjalankan kebijakan seharusnya mereka yang memiliki komitmen dan dedikasi terhadap kebijakan yang sudah ditentukan. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo pada pengangkatan birokrat para pegawai yang dipilih memiliki sikap dan karakteristik yang baik, hal ini terlihat dalam kemampuan yang dapat memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan. Tidak hanya itu saja, tetapi para pegawai yang dipilih juga memiliki kualifikasi dan pemahaman yang memadai mengenai kebijakan pelayanan administrasi kependudukan. Sebagaimana diperkuat dengan hasil wawancara oleh pernyataan Bapak affan selaku Staff Bidang Dafdud Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo :

“Ya sejauh ini seluruh pegawai sudah memiliki kualifikasi dan pemahaman yang memadai, dan para pegawai juga sangat telaten dalam melayani adek-adek SMA yang mengikuti kegiatan Goes To School tersebut”

Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo telah dipilih dengan mempertimbangkan sikap, karakteristik, keterampilan, dan kualifikasi yang baik. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, pegawai tersebut juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan yang ada dan menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melayani peserta kegiatan Goes To School, khususnya siswa SMA. Ini menandakan bahwa Disdukcapil memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kemudian untuk mempertahankan supaya kinerja pegawai selalu baik, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo juga selalu melakukan evaluasi kinerja pegawai setelah Program Goes To School berlangsung. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan dari wawancara dengan Bapak Arief Sumeru sebagai Plt. Kabid Dafdud Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo:

“Namanya tim, Namanya kegiatan pasti ada evaluasi program yang sudah dilakukan. Baik yang sudah dilakukan di awal sampai yang sudah beberapa hal. Saya pikir sampai sekarang pun tim sudah melakukan sesuai yang sudah direncanakan. Evaluasi pasti ada dilakukan per tribulan atau satu bulan sekali”

Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin, baik setelah program selesai maupun secara berkala, seperti setiap bulan atau triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo secara konsisten memantau pelaksanaan program Goes To School dan kinerja timnya, untuk memastikan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Evaluasi yang dilaksanakan juga membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program Goes To School di masa depan.

Kemudian variabel lain dalam disposisi yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu program adalah insentif. Akan tetapi jika di suatu Dinas mungkin disebut dengan SPPD atau uang perjalanan dinas, karena tidak ada yang namanya insentif khusus. Adanya uang perjalanan dinas ini dapat memotivasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan baik, demi kepentingan pribadi atau organisasi. Di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo setiap kegiatan atau pelaksanaan program di luar kantor pasti mendapatkan SPPD atau uang perjalanan dinas. Hal ini sebagaimana diungkapkan

dalam wawancara dengan Bapak affan selaku Staff Bidang Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bahwa:

“Iya SPPD itu ada kalau kegiatan diluar , jadi kegiatan diluar itu pasti ada SPPD atau uang perjalanan dinas untuk karyawannya”

Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan di luar kantor diberikan insentif berupa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau uang perjalanan dinas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian insentif tersebut bertujuan untuk memotivasi para pegawai agar dapat melaksanakan tugas atau program dengan baik, serta memberikan dukungan terhadap kepentingan pribadi dan organisasi. Adapun kinerja pegawai yang baik dan juga memiliki kualifikasi serta pemahaman yang memadai mengenai kebijakan pelayanan perekaman E-KTP dalam Program Goes To School dapat dilihat pada dokumentasi berikut :



Gambar 1. Kinerja pegawai saat Program Goes To School

Sumber: Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dari gambar 1. Dapat dilihat bahwa para pegawai yang sedang bertugas pada Program Goes To School ini menunjukkan bahwa memiliki sikap, karakteristik, kuaalifikasi serta pehaman yang memadai. Dan para petugas yang ada di lapangan juga telaten dalam melayani para siswa yang sedang melakukan perekaman E-KTP.

Berdasarkan beberapa temuan dari wawancara dan data, dapat bahwa pentingnya pemilihan birokrat yang memiliki sikap, keterampilan, dan pemahaman yang baik dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, rutin melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan pelaksanaan program berlangsung selaras dengan perencanaan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemberian insentif berupa SPPD atau uang perjalanan dinas juga memotivasi pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik, mendukung kepentingan pribadi dan organisasi, serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Hal ini sejajar dengan hasil penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Program Jadek (Jauh Jadi Dekat) Dalam Pembuatan E-KTP Di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban” (2022). Dikemukakan bahwa pelaksana program Jadek (Jauh Jadi Dekat) memiliki sikap dan komitmen yang baik meskipun menghadapi kendala seperti kekurangan fasilitas dan tidak adanya insentif khusus. Meskipun ada keterbatasan anggaran selama pandemi, operator tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bahkan menerima penghasilan tambahan secara sukarela dari masyarakat. Secara keseluruhan, disposisi pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya meskipun ada tantangan (Mellinda Clarisa & Megawati, 2022).

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menyoroti bahwa sikap, komitmen, dan keterampilan pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan pengimplementasian program. Dalam pelaksana (operator atau pegawai) menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas meskipun menghadapi tantangan, seperti kekurangan fasilitas atau terbatasnya insentif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Christopher Hood (1983), mengatakan penerapan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana pelaksana menafsirkan serta menjalankan kebijakan

tersebut. Pada sistem birokrasi yang kompleks, disposisi pelaksana dapat menentukan apakah kebijakan diterapkan dengan fleksibilitas atau justru secara kaku. Jika pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan sikap positif terhadap kebijakan, mereka cenderung menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen, meskipun menghadapi berbagai kendala (Hood, 1983).

Lebih lanjut, Eugene Bardach (1977) menyatakan bahwa disposisi pelaksana kebijakan menentukan apakah kebijakan akan dijalankan dengan niat baik atau dihindari. Sikap positif dan insentif yang memadai mendorong pelaksanaan kebijakan secara serius dan berkomitmen. Sebaliknya, kurangnya insentif atau resistensi dapat menyebabkan kebijakan dijalankan setengah hati atau dihindari (Bardach, 1980). Dengan demikian, keberhasilan Program Goes To School bergantung pada kompetensi, komitmen, dan motivasi pelaksana. Pemilihan birokrat yang tepat, insentif yang memadai, dan evaluasi rutin memastikan kebijakan berjalan efektif, sehingga pelayanan perekaman E-KTP bagi siswa dapat optimal.

3.4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Meskipun sumber daya dalam menjalankan kebijakan yang ada, dan para penyelenggara kebijakan memahami tugas yang mana harus dilaksanakan serta memiliki motivasi untuk melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat terlaksana atau tercapai akibat adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi merujuk pada sistem organisasi yang mengatur pelaksanaan suatu program dimana terdapat dua elemen utama dalam hal ini, yaitu standar operasional prosedur serta fragmentasi (Hidayat et al., 2024). Kebijakan yang rumit membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan, sumber daya akan menjadi tidak efektif dan menghambat pelaksanaannya. Birokrasi harus mendukung kebijakan politik dengan koordinasi yang baik.

Struktur birokrasi sangat berkaitan erat dengan standar operasional prosedur (SOP). Standar Operating Procedures (SOP) berkembang untuk memenuhi kebutuhan kepastian waktu, sumber daya, dan penyeragaman dalam organisasi tersebut besar serta kompleks. Melalui SOP, pelaksana dapat memaksimalkan waktu dan menyamakan langkah-langkah yang diambil, sehingga menciptakan fleksibilitas dan kesamaan dalam penerapan peraturan. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan Program Goes To School ini menggunakan SOP dalam pengimplementasiannya. Hal tersebut dilakukan agar pengimplementasian program dapat berjalan dengan baik. Adapun terkait dengan adanya SOP dalam program Goes To School menurut Bapak Yanuar selaku staff sekretariat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo :

“Kalau untuk SOP khusus program Goes To School sendiri itu nggak ada, adanya SPSOP bidang jadi hanya ada SOP globalnya aja, jadi kita mengacu melalui SOP tersebut”

Situasi ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Affan selaku Staff Bidang Dafduk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo :

“Setau saya SOP nya belum ada, GTS itu inovasi dari kita Disdukcapil untuk efisiensi waktu kan, misal anak sekolah nggak mungkin izin untuk ke Disdukcapil atau desa setempat. Jadi memang belum ada secara khusus untuk GTS terkait SOP adanya hanya SOP pelayanan global saja”

Program Goes To School (GTS) di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan tujuan efisiensi waktu dan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya pelajar, namun program tersebut belum memiliki SOP khusus. SOP yang digunakan saat ini bersifat global dan mengacu pada SOP pelayanan umum bidang dafduk (pendaftaran penduduk) yang ada di Disdukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program GTS merupakan inovasi untuk memudahkan pelajar dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, implementasinya masih mengandalkan prosedur yang lebih umum, yang mungkin tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus program GTS. Tetapi hal tersebut tidak menghambat proses pengimplementasian Program Goes To School. Selain SOP, yang berkaitan erat dengan struktur birokrasi agar pengimplementasian program dapat berjalan dengan baik yaitu fragmentasi. Fragmentasi ialah alokasi tanggung jawab atas suatu kebijakan kepada berbagai badan yang berbeda, yang mengharuskan adanya koordinasi. Dalam pelaksanaan Program Goes To School (GTS) ada berbagai pihak yang terlibat, selain Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak sekolah, ada instansi atau pihak lain yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dilakukan agar DPR bisa mengawasi jalannya Program Goes To School. Karena Program Goes To School masih termasuk kedalam pelayanan pemerintahan. Situasi ini sejalan dengan temuan dari wawancara dengan Bapak Bapak Affan sebagai Staff Bidang Dafdud Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa :

“Biasanya Program GTS itu sama sosialisasinya dari DPR, karena Disdukcapil ini termasuk dalam programnya developernya DPR, Jadi sebelum perekaman selalu ada sambutan dari DPRD nya”

Hal ini selaras dengan wawancara bersama Arief Sumeru selaku Plt. Kabid Dafdud Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo:

“Ada, kita juga pada kegiatan namanya instansi atau pemerintah juga tidak lepas dari pengawasan juga pendampingan dari Lembaga legislatif. Beliau yang mendampingi dan mengevaluasi dari kegiatan GTS yang selalu mengikuti dari kegiatan dimaksud. DPR disini sebagai narasumber itupun dari instansi atau dari komisi DPR yang mebidangi pemerintahan atau Komisi A. Karena Dukcapil bagian dari layanan pemerintahan”

Pada pelaksanaan Program Goes To School (GTS), selain melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan pihak sekolah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut terlibat. DPR berperan dalam mengawasi dan mendampingi jalannya program, karena GTS merupakan bagian dari pelayanan pemerintahan yang harus dievaluasi dan diawasi oleh lembaga legislatif. DPR, khususnya Komisi A yang membidangi pemerintahan, berperan sebagai narasumber dan pengawas dalam setiap kegiatan program, termasuk dalam sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi antara Disdukcapil, DPR, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan pengimplementasian Program Goes To School. Adapun SOP global bidang dafdud yang digunakan dalam pengimplementasian Program Goes To School agar program bias berlangsung dengan baik, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. SOP Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Pemula

		SOP PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WNI PEMULA					KODE DOKUMEN	
							TGL. PEMBUATAN	
							TGL. REVISI	
							TGL. EFEKTIF	
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	JFU/Pelaksana	Subko/Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon membawa berkas permohonan perekaman KTP - Elektronik secara offline		Tidak			Dokumen Persyaratan	10 menit	Berkas Persyaratan
2	Pemohon Mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang sudah disediakan					Dokumen Persyaratan	5 menit	Berkas Persyaratan, Nomor Antrian
3	Pelaksana Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali		Ya			Dokumen Persyaratan	5 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Petugas
4	Pelaksana Melakukan Perekaman Data Biometric pemohon					Dokumen Persyaratan, Komputer, Alat Perekaman Biometric	3 menit	Perekaman Data Biometric
5	Pelaksana Memberikan tanda terima Pencetakan KTP - Elektronik					Tanda Terima Perekaman KTP - Elektronik	1 menit	Tanda Terima Pencetakan KTP - Elektronik
6	Pemohon Menerima tanda terima Pencetakan KTP - Elektronik					Tanda Terima Pencetakan KTP - Elektronik	1 menit	Tanda Terima Pencetakan KTP - Elektronik

Sumber: Hasil olah peneliti, dari Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dari tabel 3. Dapat dilihat bahwa Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk pelayanan perekaman KTP bagi pemula pada Program Goes To School mengacu pada SOP global bidang dafdud. Hal tersebut dilakukan agar Program Goes To School di SMA se Kabupaten Sidoarjo berjalan secara optimal.

Dari beberapa hasil wawancara dan data, dapat disimpulkan Program Goes To School (GTS) di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan akses bagi pelajar, namun belum memiliki SOP khusus. Program ini mengacu pada SOP global bidang dafdud yang berlaku untuk pelayanan umum, yang mencakup prosedur perekaman KTP bagi pemula. Meskipun demikian, implementasi GTS tetap berjalan baik karena adanya koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pihak sekolah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berperan dalam mengawasi dan mendampingi jalannya program. Hal ini sejajar dengan hasil penelitian terdahulu dengan judul

“Implementasi Program Sipelandukilat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman (Studi Kasus Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)” (2023). Dikemukakan bahwa Program SIPELANDUKILAT di Kalimantan Utara memiliki struktur birokrasi yang jelas, dengan provinsi sebagai penanggung jawab utama. Pelaksanaan program berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara tim pelaksana dari berbagai tingkat, serta adanya SOP yang telah disusun. Sistem jemput bola sangat membantu masyarakat perbatasan dalam pengurusan dokumen kependudukan, meskipun ada kendala pemahaman mengenai pentingnya dokumen tersebut. Komunikasi yang intens dan koordinasi yang efektif antara tim pelaksana juga mendukung kelancaran program, yang mendapat respons positif dari masyarakat, termasuk apresiasi berupa hasil kebun (Wulandari & Widowati, 2023).

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menyoroti pentingnya struktur birokrasi yang terorganisir, koordinasi yang baik, dan penggunaan SOP yang jelas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Kemudian koordinasi antar berbagai tingkat pelaksana dan kerjasama dengan pihak terkait sangat penting untuk kelancaran program. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber (1978) yang menggambarkan birokrasi sebagai sistem organisasi yang rasional, hierarkis, dan berorientasi pada aturan untuk memastikan efisiensi dalam administrasi publik. Birokrasi yang ideal harus memiliki struktur yang jelas, di mana setiap tingkatan memiliki kewenangan yang tegas dan sistem pengambilan keputusan yang terorganisir (Weber, 1978).

Lebih lanjut, Abdul Wahab (2008) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kapasitas birokrasi dalam mengelola sumber daya serta koordinasi antarunit. Birokrasi yang efektif akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, sementara struktur yang terlalu rumit justru dapat menghambatnya. Kompleksitas birokrasi berisiko menimbulkan inefisiensi dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan (Wahab, 2008). Dengan demikian, keberhasilan Program Goes To School di Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa koordinasi yang baik serta struktur birokrasi yang terorganisir berperan penting dalam mendukung efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Meskipun belum memiliki SOP khusus, program ini tetap berjalan optimal berkat sinergi antara Disdukcapil, pihak sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis pembahasan yang telah paparkan diatas, berkaitan dengan Implementasi Program Goes To School (GTS) dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo disimpulkan bahwa; pada indikator komunikasi, dalam pelaksanaan Program Goes To School transmisi informasi yang jelas, konsistensi dalam pelaksanaan, dan pembagian tugas yang terorganisir dengan baik. Komunikasi yang jelas memastikan semua pihak, baik sekolah maupun petugas Disdukcapil, memahami tujuan dan prosedur program, sedangkan konsistensi dalam pelaksanaan mendukung kelancaran dan meningkatkan efektivitas program. Pembagian tugas yang jelas memperkuat kerjasama antar tim sehingga program dapat terlaksana dengan baik, namun disarankan agar komunikasi terus dijaga dan diperbaiki, yakni dengan memastikan semua informasi selalu diperbarui dan disampaikan tepat waktu kepada semua pihak terkait. Pada indikator sumber daya, Program Goes To School di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan masalah teknis. Pada sumber daya anggaran sudah mencukupi, tetapi pada keterbatasan staf dan fasilitas, seperti mesin cetak dan jaringan, hal ini menghambat kelancaran program. Keberhasilan program sangat terpaut pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik manusia, fasilitas, maupun anggaran. Maka Perlu peningkatan jumlah staf dan fasilitas pendukung, serta perbaikan teknis supaya Program Goes To School dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Selanjutnya pada indikator disposisi, dimana pada Program Goes To School pegawai yang terlibat memiliki kualifikasi yang baik dan sikap yang positif. Evaluasi kinerja secara rutin dan pemberian insentif seperti SPPD juga berkontribusi pada motivasi dan kinerja yang optimal. Dalam hal ini harus terus mempertahankan evaluasi kinerja yang rutin dan memastikan pemberian insentif yang memadai agar pegawai tetap termotivasi dan kinerja dapat lebih optimal. Terakhir pada indikator

struktur birokrasi, Program Goes To School mengacu pada SOP global bidang dafduk, dan tetap berjalan efektif berkat koordinasi yang baik antara Disdukcapil, pihak sekolah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keterlibatan berbagai pihak memastikan pelaksanaan program berjalan dengan efisien dan mudah diakses oleh pelajar, namun agar Program Goes To School lebih terstruktur disarankan untuk segera menyusun SOP khusus Program Goes To School supaya sesuai dengan kebutuhan program.

5. Referensi

- [1] Adinata, M. A., Putera, R. E., Kusdarini, K., Publik, D. A., & Andalas, U. (2024). Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kota batam. *Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 704–716.
- [2] Bardach, E. (1980). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*. MIT Press.
- [3] Berlianto, A., & Muljanto, M. A. (2024). Implementasi Program “Paling Jempol” Ktp Untuk Pemula. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 254. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i2.8492>
- [4] Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (M. S. Grindle (ed.)). Princeton University Press.
- [5] Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press. https://doi.org/0807015075_9780807015070
- [6] Hasibuan, E. H., Badaruddin, & Karyono. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Implementation of E-KTP Policy in Padangsidempuan City. *PERSPEKTIF*, 9(2), 465–482.
- [7] Herawan, H., & Dai, R. M. (2021). Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan KTP-EL di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 23–28.
- [8] Hidayat, H., Budiman, A., & Raudah, S. (2024). Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Balangan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1, 714–720.
- [9] Hood, C. (1983). *The Tools of Government*. Macmillan.
- [10] Indarwati, N., & Mirani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman e-KTP bagi Disabilitas di Kota Palembang. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2, 35–48. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.28>
- [11] Kasari, M. H., Rohmah, D. N., Rohmah, A., Widyaningsih, A., & Oktaviyanti, A. (2024). Inovasi Dalam Organisasi: Inovasi Program E – Lampid Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. *Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(95), 382–391.
- [12] Kasih, P. B., & Harsanti, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Layanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Registratie*, 4(2), 114–128. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2809>
- [13] Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- [14] Manshuri, S., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Program Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (Kng) Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Publika*, 2491–2504. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2491-2504>
- [15] Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- [16] Mellinda Clarisa, Z., & Megawati. (2022). Implementasi Program Jadek (Jauh Jadi dekat) Dalam Pembuatan KTP-el di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Zana Malinda Clarissa Suci Megawati. *Publika*, 10(135–148), 14.
- [17] Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). *The Policy Implementation Process: A*

- Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- [18] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publications, 2014. Accessed: Nov. 20, 2024. [Online]. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- [19] Patu, F., Pramudiana, I. D., Artikel, H., Kependudukan, A., Disabilitas, E. B., & Kabupaten, D. (2023). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 8, 1–8.
- [20] Prasetyowati, T., Kurniawan, B. A., & Agustina, D. E. (2023). Implementasi Program Jemput Artis (Jemput Bola Pelayanan Gratis) Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 592. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.592-602>
- [21] Putra, R. S., & Pertiwi, V. I. (2023). Jemput Bola Terpadu Goes To School (Jbt Gts) Sebagai Inovasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 602–612. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10081701>
- [22] Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- [23] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- [24] Suhartatik, M. A., & Rodiyah, I. (2024). Implementation of the Sipraja Program in Public Administrative Services : Implementasi Program Sipraja dalam Pelayanan Administrasi Publik. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(3), 1–17.
- [25] Syamuni, P., Sya'bani Arlan, A., Dharma, A. S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Amuntai, I. A. (2024). Efektivitas Program Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- [26] Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162–180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- [27] Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Kencana.
- [28] Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Volume 1*. Univ of California Press.
- [29] Wulandari, S., & Widowati, A. (2023). Implementasi Program Sipelandukilat dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 11–24. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3179%0Ahttps://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3179/1544>